



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAFIUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 3180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 938.025.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 4900 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 107.300.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 578.540.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 82.080.000
4. Tanah Seluas 7500 m² di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 53.625.000
5. Tanah Seluas 328 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 52.480.000
6. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 226.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH TRD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO/SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 65.100.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.903.481
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.245.028.481
III. HUTANG	Rp.	247.455.632
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	997.572.849

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.